

**PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK KANADA TERHADAP
IRAN; STUDI KASUS PADA MASA PEMERINTAHAN STEPHEN
HARPER (2006-2012)**

*Diplomatic Termination of Canada to Iran; Case Study During The Reign of
Stephen Harper (2006-2012)*

Hafizhah Zahra

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183**

E-mail: hafizhahzahra19@gmail.com

Abstract

Diplomatic termination of Canada to Iran is Canada's Foreign Policy which taken unilaterally against Iran. The change of Canada's foreign policy was taken as a pressure against Iran's nuclear development program that is considered as a threat to international security. The purpose of this study is to describe the factors that led Canada to cut off diplomatic relations to Iran. The results of this study showed that diplomatic termination of Canada to Iran affected by political party and pressure from Jewish interest groups in Canada.

Pemutusan hubungan diplomatik Kanada terhadap Iran merupakan kebijakan politik luar negeri Kanada yang dilakukan secara sepihak terhadap Iran. Perubahan arah kebijakan politik luar negeri Kanada diambil sebagai tekanan terhadap program pengembangan nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman keamanan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Kanada memutuskan hubungan diplomatik terhadap Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik Kanada terhadap Iran dipengaruhi oleh partai politik dan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan Yahudi di Kanada.

Keywords: *diplomatic termination, jewish lobby, canada iran*

Pendahuluan

Pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara merupakan hal yang wajar di dunia internasional, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, dibutuhkan kebijakan-kebijakan politik luar negeri dimana kebijakan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional negaranya. Kanada merupakan sebuah negara yang terletak di bagian paling utara dari Amerika Utara, sedangkan Iran merupakan negara kawasan Timur Tengah yang terletak di Asia bagian Barat. Jarak antar negara tidak menjadi sebuah halangan untuk menjalin sebuah hubungan diplomatik. Pada awalnya, Kanada dan Iran tidak memiliki ikatan

diplomasi secara resmi. Hal tersebut menyebabkan kontak politik dan hubungan komersial lainnya yang terjadi antara kedua negara, yakni Kanada dan Iran berlangsung sangat minim.

Dimulai pada tahun 1955, Duta Besar Iran untuk Washington, yaitu Ali Amini, menghubungi pemerintah Kanada untuk meminta izin secara resmi untuk membangun misi diplomatik di Ottawa. Permohonan tersebut dikabulkan oleh pemerintah Kanada sehingga pada tahun 1956 Iran mengirimkan Ali Motamedi sebagai perwakilan misi diplomatik pertamanya ke Kanada. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1959, Kanada baru mengirimkan George Summers sebagai perwakilan misi diplomatiknya ke Teheran untuk menjalankan urusan politik luar negeri Kanada di Iran. Hubungan antara Kanada dengan Iran kemudian meningkat pada level kedutaan pada tahun 1961 dengan dibukanya kantor Kedutaan Besar Kanada di Teheran. Dengan terjalinnya ikatan diplomatik antara Kanada dengan Iran pada level kedutaan, maka hubungan politik dan ekonomi di antara kedua negara tersebut turut mengalami peningkatan. Pada bulan April tahun 1971, *Ministry of Industry, Trade and Commerce* Kanada memperpanjang hutang pinjaman sebesar \$100 juta kepada Iran. Pinjaman tersebut digunakan oleh pemerintah Iran untuk membeli peralatan militer dan *software* penerbangan dari Kanada dalam jangka beberapa tahun kedepan.

Pada bulan April tahun 1974, Alistair Gillespie selaku Menteri Industri dan Perdagangan Kanada ditugaskan untuk memimpin delegasi perdagangan ke Iran. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pemerintah Kanada dengan pemerintah Iran untuk membangun *Canada-Iran Joint Economic Commission*. Pertemuan terkait dengan *Canada-Iran Joint Economic Commission* menghasilkan kontrak proyek-proyek jangka panjang di antara pemerintah Kanada dengan pemerintah Iran, termasuk pembuatan pabrik pengolahan aluminium serta kontrak layanan untuk mendirikan penjaga pantai di Pantai Iran dan sebuah sistem keamanan sosial. Kerjasama-kerjasama ekonomi yang terjalin di antara Kanada dan Iran menjadikan Iran sebagai mitra utama perdagangan Kanada di Kawasan Timur Tengah.

Dalam sebuah hubungan internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan diplomatik di antara negara satu dengan negara lainnya dapat berubah-ubah dan mengikuti perkembangan perpolitikan nasional maupun internasional. Begitu pula dengan hubungan antara Kanada dan Iran yang tentu saja mengalami fluktuasi di sepanjang perjalanannya dalam menjalin hubungan diplomatik. Lamanya sebuah hubungan diplomatik yang telah terjalin di antara kedua negara bukan menjadi jaminan bahwa hubungan di antara kedua negara tersebut akan selalu berjalan baik dan mulus. Pada tahun 2006, Stephen Harper di bawah Partai Konservatif Kanada terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada yang ke-22 dan menggantikan pemerintahan liberal yang sebelumnya berkuasa di Kanada. Bukan tidak mungkin hal tersebut mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik, baik kebijakan politik dalam negeri maupun kebijakan politik luar negeri, yang diambil oleh pemerintah Kanada di bawah kepemimpinan Stephen Harper yang konservatif. Hal tersebut kemudian terbukti dengan adanya perubahan arah

kebijakan politik luar negeri pada masa kepemimpinan Stephen Harper dimana pada tahun 2012 pemerintah Kanada secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

PEMBAHASAN

Kanada merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Kanada merupakan sebuah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan dan kemajuan sosial yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi di Kanada tergolong solid dengan kenaikan rata-rata sebesar 2,28% per tahun (OECD, 2014). Sejak tahun 2006, posisi perdana menteri di Kanada diduduki oleh Stephen Harper dibawah Partai Konservatif Kanada. Kebijakan politik luar negeri Kanada merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan nasional sehingga segala aktivitas hubungan internasional beserta kebijakan politik luar negeri Kanada harus mewakili nilai-nilai dan tujuan dari kebijakan nasional Kanada. Di bawah kepemimpinan Stephen Harper yang konservatif, isu keamanan dan perdamaian dunia, krisis kemanusiaan serta pro Israel menjadi inti dari kebijakan luar negeri Kanada (United Nations, 2006).

Bentuk negara Kanada adalah federasi. Kanada dibagi menjadi 10 provinsi dan 3 teritori atau wilayah. Masing-masing provinsi memiliki kewenangan untuk menjalankan *self-governance* sedangkan masing-masing teritori diatur oleh pemerintah pusat. Kanada memiliki Parlemen yang di dalamnya terdapat Gubernur Jenderal yang bertugas mewakili Ratu; sebuah Majelis Tinggi yang ditunjuk; Senat; dan sebuah Majelis Rendah terpilih, Dewan Rakyat. Untuk setiap provinsi terdapat cabang legislatif, dengan Gubernur Letnan yang bertugas mewakili Ratu; untuk setiap provinsi kecuali Ontario, sebuah Majelis Tinggi ditunjuk, Dewan Legislatif, dan sebuah Majelis Rendah terpilih, Majelis Legislatif.

Sistem pemerintahan sebuah negara demokrasi tidak akan berjalan tanpa adanya partai politik, begitu juga dengan sistem pemerintahan negara Kanada. Partai politik yang memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum nantinya akan membentuk pemerintahan. Partai terbesar kedua dalam perolehan suara dengan dukungan dari partai-partai kecil lainnya tetap dapat memperoleh kursi dalam parlemen yang kemudian menjadi partai oposisi dalam sistem pemerintahan. Kanada menganut sistem multi partai, beberapa di antaranya antara lain Partai Konservatif Kanada, Partai Liberal Kanada, Partai Hijau dan Partai Demokratik Baru. Meskipun Kanada menganut sistem multi partai, namun hanya ada dua partai besar yang mendominasi perpolitikan Kanada dari tahun 1900an hingga saat ini, yaitu Partai Konservatif Kanada dan Partai Liberal Kanada.

HUBUNGAN ANTARA KANADA DAN IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN STEPHEN HARPER

Tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lain akan selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan perpolitikan dalam negeri maupun perkembangan perpolitikan internasional, setidaknya hal tersebut terjadi diantara hubungan diplomatik antara Kanada dengan Iran.

Sejumlah permasalahan baik kecil maupun besar telah banyak terjadi dan menyebabkan dampak pada keharmonisan hubungan di antara kedua negara tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul dan terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya memiliki dampak yang berlanjut pada pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkuasa untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang belum berhasil menemukan titik temu. Pada tahun 2006, Stephen Harper di bawah Partai Konservatif Kanada terpilih menjadi Perdana Menteri Kanada yang ke-22. Pemerintahan Harper meneruskan kebijakan pemerintahan liberal sebelumnya dalam mensponsori resolusi HAM dalam komite ketiga PBB pada November 2006. Pada pertemuan tersebut, PBB menerima draft resolusi Kanada terkait isu HAM. Dalam pertemuan di Majelis Umum tersebut, Iran berbalik menyerang Kanada dengan tuduhan kegiatan spionase yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Kanada di Teheran. Namun pemerintah Kanada, melalui DFAIT (*Department of Foreign Affairs and International Trade*), menolak tuduhan tersebut.

Perdebatan Situasi Hak Asasi Manusia antara Kanada dengan Iran

Sejak terjadinya Revolusi Iran tahun 1978, pelanggaran Hak Asasi Manusia di Iran semakin meningkat. Penerapan hukum Islam di negara Iran juga menimbulkan datangnya keprihatinan dari negara-negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sudah banyak isu HAM yang terjadi di Iran sejak kepemimpinan Khomeini hingga saat ini, seperti pembunuhan di luar hukum, kematian dalam tahanan, ketidaksetaraan gender, hukuman mati, kebebasan berpolitik, kebebasan pers, kebebasan beragama dan masih banyak lagi. Perhatian kebijakan politik luar negeri Kanada yang berfokus pada keamanan dan perdamaian dunia serta krisis kemanusiaan kemudian mendorong Kanada untuk memberikan kontribusinya dalam upaya mengurangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Iran. Pada bulan November tahun 2007, Kanada dan Iran berdebat mengenai isu HAM pada saat menghadiri Komite Ketiga di Jenewa. Kanada memberikan sumbangan terbesar pada rancangan resolusi untuk negara Iran terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di dalam negeri Iran.

Penurunan Level Hubungan Diplomatik antara Kanada dengan Iran

Dalam sebuah hubungan diplomatik level kedutaan di antara dua negara, maka sudah menjadi kewajiban untuk melakukan pertukaran misi diplomatik. Pada tahun 2007 saat pertukaran Duta Besar antara Kanada dan Iran, Kanada menolak dua kandidat yang diajukan oleh Iran. Alasan penolakan tersebut adalah karena intelijen Kanada menemukan bahwa dua kandidat tersebut merupakan mantan Duta Besar Iran untuk Jerman dan bekas Uni Soviet yang terlibat dalam krisis penyanderaan diplomat Amerika tahun 1979-1981. Pemerintah Kanada tidak pernah menyebutkan nama dari dua kandidat yang ditolak tersebut. Sebagai balasannya, John Mundy yang diutus oleh pemerintah Kanada sebagai misi diplomatiknya juga tidak diterima secara resmi oleh pemerintah Iran sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Penolakan pertukaran Duta Besar di antara kedua negara tersebut mengindikasikan adanya penurunan level hubungan

diplomatik. Pemerintah Iran kemudian memerintahkan John Mundy untuk meninggalkan Iran dan sejak saat itu hubungan antara Kanada dan Iran benar-benar dibatasi dan hanya berjalan pada tingkat Kuasa Usaha. Kedutaan Besar Kanada di Iran selanjutnya hanya dipimpin oleh seorang *charge d'affaires*. Kedua negara masih mencoba mempertahankan kantor kedutaan di ibukota masing-masing dan melakukan operasi normal meski sebatas pada hubungan Kuasa Usaha.

Protes Pemerintah Iran terhadap Pemerintah Kanada

Pada tanggal 17 Juni 2009, terjadi kekisruhan besar pasca pemilihan Presiden di Iran. Berdasarkan hasil pemilihan Presiden Iran tanggal 12 Juni 2009, Presiden Mahmoud Ahmadinejad kembali memenangkan pemilihan dan melanjutkan kekuasaannya sebagai Presiden Iran. Hal tersebut menyebabkan para pendukung rivalnya, Mir-Hosseini Mousavi, melakukan aksi protes karena menganggap ada kecurangan pada saat penghitungan suara. Menteri Dalam Negeri Iran selaku penanggung jawab pemilihan Presiden Iran menyangkal tuduhan tersebut. Kemudian Lawrence Cannon, selaku Menteri Luar Negeri Kanada pada saat itu, menyerukan agar diadakan investigasi penuh dan transparan terhadap perselisihan dan kecurangan pemilihan presiden di Iran. Tidak lama kemudian, pemerintah Iran memanggil perwakilan Kanada untuk menyampaikan protes secara resmi terhadap pemerintah Kanada. Michel de Salaberry sebagai perwakilan Kuasa Usaha Kanada untuk Iran bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran terkait protes pemerintah Iran terhadap Kanada yang dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Iran. Menteri Luar Negeri Iran memanggil perwakilan pemerintah Kanada untuk menyampaikan protes secara resmi terkait pernyataan pemerintah Kanada yang dianggap memiliki sudut pandang negatif terhadap pemerintahan Iran.

Pemberian Sanksi Kanada terhadap Iran

Puncak dari semakin memburuknya hubungan antara Kanada dengan Iran semakin terlihat. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kanada untuk menghentikan program nuklir Iran dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Iran tidak membuahkan hasil yang positif. Iran telah menandatangani NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) pada tahun 1968 dan mengklaim bahwa kegiatan nuklirnya dikembangkan sebagai sumber energi untuk tujuan damai (Federal Research Division, 2008). Perlu diketahui bahwa Iran sempat menghentikan program nuklirnya akibat Revolusi Iran. Namun pada tahun 2005, Iran di bawah kepemimpinan Khomeini memutuskan untuk kembali mengembangkan program nuklirnya dan bersikeras menyatakan bahwa program ini dikembangkan untuk tujuan damai. IAEA (*International Atomic Energy Agency*) kemudian menemukan indikasi bahwa Iran melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. IAEA mengatakan bahwa Republik Islam Iran menyembunyikan beberapa bagian dari program nuklirnya, termasuk pengayaan uranium dan pemisahan plutonium yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai senjata nuklir, dan gagal menjawab pertanyaan yang diajukan terkait kemungkinan kerja militer. Pengembangan program nuklir Iran selanjutnya menjadi keprihatinan dunia internasional, Dewan

Keamanan PBB juga mengambil langkah-langkah tegas dalam upaya menghentikan pengembangan program nuklir Iran. Hal tersebut kemudian menyebabkan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sanksi terkait pengembangan program nuklir Iran sebanyak empat kali berturut-turut sejak tahun 2006 dengan mengadopsi resolusi 1737 tahun 2006, resolusi 1747 tahun 2007, resolusi 1803 tahun 2008, dan resolusi 1929 tahun 2010. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB terkait pengayaan uranium Iran tidak membuahkan hasil sama sekali. Iran terus memperkaya uraniumnya dan secara terang-terangan menentang Dewan Keamanan PBB dengan alasan bahwa negara Iran memiliki hak untuk mengembangkan program nuklirnya di bawah NPT (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*).

Pada tahun 2010, Kanada secara tegas menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran terkait kegagalan Iran dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk mematuhi resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Kanada di bawah *Special Economic Measures Act* (SEMA) mengeluarkan SEMA *Iran Regulations* (SOR/2010-165) pada 22 Juli 2010 (DFAIT, 2010). Pada tahun 2011, Kanada kembali memberikan sanksi tambahan terhadap Iran sebanyak dua kali berturut-turut pada 17 Oktober 2011 dengan menerbitkan *Regulations Amending the Special Economic Measures (Iran) Regulations* (SOR/2011-225) dan pada 21 November 2011 dengan menerbitkan *Regulations Amending the Special Economic Measures (Iran) Regulations* (SOR/2011-268). Sanksi tersebut ditujukan untuk menekan dan mencegah Iran mendapatkan barang-barang, teknologi dan layanan yang dapat mendukung kegiatan nuklir Iran. Sanksi tersebut juga membatasi ekspor ke Iran dari berbagai barang yang dapat digunakan untuk mendukung program nuklir Iran termasuk ekspor barang-barang yang digunakan dalam industri minyak, gas dan petrokimia.

Pemberian sanksi ekonomi Kanada terhadap Iran tentunya memberikan dampak yang tersendiri bagi kedua negara tersebut. Beberapa departemen pemerintah akan menghadapi beban administrasi yang meningkat karena regulasi tersebut. Badan Layanan Perbatasan Kanada atau *The Canada Border Services Agency* akan memiliki beban investigasi dan pelaporan yang lebih besar; dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional harus menerima dan memproses sejumlah besar izin yang meminta pembebasan dari regulasi tersebut. Bisnis di sektor manufaktur dapat mengalami dampak negatif dari sanksi jika menghasilkan peralatan yang dibutuhkan di sektor penyulingan dari industri minyak dan gas Iran. Melalui perizinan dari Menteri Luar Negeri Kanada, bisnis-bisnis Iran dengan Kanada dapat tetap berlanjut jika, misalnya, bisnis tersebut dapat menunjukkan bahwa transaksi yang terjalin tidak terhubung dengan kegiatan proliferasi nuklir Iran atau program yang berkaitan dengan senjata pemusnah massal. Bagi Iran, pemberian sanksi tersebut memberikan dampak yang negatif seperti melemahnya perekonomian Iran, terjadinya kenaikan inflasi, tingkat pengangguran semakin tinggi, nilai tukar mata uang Iran semakin melemah, meningkatnya kesenjangan ekonomi dan infrastruktur yang memburuk. Meskipun pemberian sanksi ekonomi dari PBB dan Kanada serta beberapa negara lainnya di dunia memberikan dampak negatif bagi perekonomian Iran, hal

tersebut tidak menciutkan niat pemerintah Iran untuk menghentikan pengembangan program nuklirnya. Pada awal tahun 2012, Kanada kembali memberikan sanksi tambahan terhadap Iran. Dalam sanksi tersebut juga menyertakan larangan hampir seluruh transaksi keuangan dengan Iran termasuk transaksi yang melibatkan Bank Sentral. Sama seperti sebelumnya, sanksi-sanksi Kanada terhadap Iran tidak membuat pemerintah Iran menghentikan pengembangan program nuklirnya.

Dalam pemilihan umum federal ke 39 tahun 2006, Partai Konservatif Kanada mendapatkan suara sebanyak 36,27% dalam pemilihan dan mendapatkan jatah sebanyak 124 dari 308 kursi dalam parlemen. Stephen Harper yang menjabat sebagai pemimpin Partai Konservatif Kanada kemudian menjadi Perdana Menteri Kanada. Di posisi kedua terdapat Partai Liberal Kanada yang memperoleh suara sebanyak 30,32% dan mendapatkan jatah kursi sebanyak 103 di parlemen. Di bawahnya terdapat *Bloc Quebecois* dengan perolehan suara sebesar 10,48% dan mendapatkan 51 kursi di parlemen. Setelah itu terdapat Partai Demokratik Baru yang memperoleh 17,48% namun hanya memperoleh 29 kursi dalam parlemen. Di bawahnya terdapat kandidat independen yang memperoleh suara sebesar 0,55% dan menduduki 1 kursi di parlemen. Selain itu, terdapat beberapa partai yang memperoleh suara kurang dari 1 persen dan tidak mendapatkan kursi di parlemen. Jadi, pada masa pemerintahan Stephen Harper sejak tahun 2006, parlemen Kanada didominasi oleh anggota dari Konservatif. Partai Liberal Kanada dengan partai kecil lainnya yang berhasil menduduki parlemen menjadi oposisi dalam parlemen.

Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada terhadap Iran

Sanksi-sanksi yang diberikan oleh Kanada terhadap Iran tidak membuat pemerintah Iran menghentikan pengembangan program nuklirnya. Ketegangan hubungan antara Kanada dengan Iran juga tidak kunjung mereda. Melihat kondisi tersebut, Kanada kemudian menetapkan langkah tegasnya. Pada 7 September 2012, Kanada memutuskan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Iran. Pernyataan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kanada terhadap Iran disampaikan oleh John Baird selaku Menteri Luar Negeri Kanada. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat John Baird menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pasific Economic Cooperation* (APEC) di Rusia pada 7 September 2012.

Putusnya sebuah hubungan diplomatik antar dua negara dalam hukum internasional diperbolehkan sebagai suatu bentuk tekanan politik tertentu kepada suatu negara. Hal itu dapat dilakukan dengan tujuan supaya negara lain mau atau mampu merubah arah kebijakannya agar dapat selaras ataupun bertujuan untuk menghukum tindakan tertentu dari negara lain yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional seperti tindakan provokasi, pelanggaran perbatasan, intervensi urusan dalam negeri negara lain ataupun masalah-masalah politik lainnya. Pemutusan hubungan diplomatik tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Kanada setelah tidak adanya pemecahan masalah dari permasalahan-permasalahan yang kerap kali terjadi diantara hubungan kedua negara tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, hal tersebut juga didorong oleh faktor

eksternal berupa hubungan bilateral erat yang terjalin antara Kanada dengan Israel.

Dalam kasus pemutusan hubungan diplomatik antara Kanada dengan Iran, penulis mengimplementasikan teori pembuatan keputusan model politik birokratik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pemerintahan Stephen Harper dalam menetapkan kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini pembuatan keputusan tersebut merupakan hasil dari sebuah proses politik. Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, secara khusus memiliki sebuah hubungan dekat dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Oleh karena kedekatan Harper dengan Netanyahu, maka membuat Kanada menjadi negara yang memiliki sikap pro-Israel dalam segala hal sepanjang masa pemerintahan Harper. Bahkan mendukung Israel sudah menjadi inti dari kebijakan Kanada terhadap Timur Tengah sejak tahun 1948. Kebijakan politik luar negeri pemerintah Kanada terhadap Iran tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri Kanada yang pro Israel. Kebijakan politik luar negeri pemerintah Stephen Harper terhadap Iran merupakan sebagian besar dari dukungannya yang kuat terhadap keamanan Israel yang berdiri di atas kepentingan ekonomi.

PARTAI KONSERVATIF KANADA SEBAGAI PARTAI PRO YAHUDI

Partai Konservatif yang telah berhasil membawa Stephen Harper memenangkan pemilihan umum federal Kanada selama tiga periode berturut-turut sejak tahun 2006 merupakan partai politik yang sangat pro Yahudi. Hal tersebut terlihat saat *Talking Points* mengenai kebijakan luar negeri Kanada yang disampaikan oleh Stockwell Day, seorang politisi Partai Konservatif Kanada, yang mengatakan bahwa Kanada dan Israel berbagi kepentingan bersama dalam memerangi terorisme global. Perlu diketahui bahwa Israel merupakan negara bangsa Yahudi, sedangkan Kanada merupakan negara terbanyak kelima yang di dalamnya terdapat masyarakat Yahudi. Di bawah pemerintahan konservatif Stephen Harper, Kanada menjadi negara yang paling memiliki sikap pro Israel di dunia. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan dan tekanan kelompok Yahudi Kanada terhadap pemerintah Kanada. Orang-orang Yahudi di Kanada juga memiliki keterlibatan politik yang tinggi dalam pemerintahan, hal tersebut terwakili dengan banyaknya orang-orang Yahudi yang menduduki jabatan penting dalam pemerintahan di Kanada. Banyak dari anggota Konservatif yang juga merupakan keturunan Yahudi dan menduduki pemerintahan di Kanada pada masa Stephen Harper, hal tersebut mempengaruhi pembuatan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kanada, terutama kebijakan mengenai urusan Yahudi dan pro Israel. Anggota Partai Konservatif Kanada yang merupakan keturunan Yahudi, antara lain Mark Adler (anggota Parlemen Kanada provinsi York Centre 2011-2014), Stephen Mandel (walikota provinsi Edmonton 2004-2013), Tom Marshall (anggota *House of Assembly* 2003-2014), Joseph Joe Oliver (anggota Parlemen Kanada distrik Eglinton-Lawrence 2011-2015), dan masih banyak lagi.

LOBI YAHUDI DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI KANADA

Kanada merupakan rumah terbesar kelima bagi komunitas Yahudi di dunia. Adanya eksodus besar-besaran masyarakat Yahudi ke Kanada telah memberikan pengaruh bagi Kanada. Orang-orang Yahudi yang menjadi pengusaha sukses, memiliki jaringan media yang kuat, serta dana tak terbatas secara nyata mempengaruhi kondisi politik Kanada, baik mengenai politik dalam negeri maupun politik luar negeri Kanada. Banyak tokoh Kanada keturunan Yahudi yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Kanada, selain itu jumlah keturunan Yahudi Kanada juga tergolong besar. Pengaruh Yahudi dalam politik luar negeri Kanada tidak terlepas dari lobi-lobi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi melalui berbagai komunitas dan organisasi Yahudi. Secara nyata hal tersebut dapat terlihat dengan adanya CJPAC (*Canadian Jewish Political Affairs Committee*) dan CIJA (*Centre for Israel and Jewish Affairs*).

Lobi *Canadian Jewish Political Affairs Committee* (CJPAC)

CJPAC merupakan organisasi independen nasional yang bersifat multi partisan dimana mandatnya adalah untuk terlibat dalam urusan Yahudi dan bersifat pro Israel dalam proses demokratik dan juga untuk mendorong partisipasi politik aktif. CJPAC didedikasikan untuk membantu masyarakat dalam membangun hubungan di dalam area perpolitikan Kanada. Dengan kata lain CJPAC merupakan sebuah komite antara Yahudi dengan Kanada mengenai urusan-urusan publik. Salah satu program CJPAC adalah program *fellowship* yang mengarahkan mahasiswa untuk aktif terlibat secara politik dan mendorong masyarakat Kanada untuk terlibat dalam proses demokrasi selama proses pemilihan umum.

CJPAC memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Kanada melalui kongres, terutama mengenai kebijakan politik luar negeri Kanada di kawasan Timur Tengah. CJPAC sebagai organisasi akar rumput di Kanada pada tahun 2006 terlibat secara langsung pada proses pemilihan umum. CJPAC memberikan dukungan secara langsung terhadap Partai Konservatif Kanada dalam kampanye dan pemilihan umum dimana dukungan tersebut dikenal dengan sebutan *action party* dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum federal tersebut. CJPAC juga memberikan dukungan finansial terhadap Partai Konservatif Kanada sebesar \$10.000 pada tahun 2008. *Canadian Jewish News* kemudian memberitakan kesuksesan CJPAC sebagai lobi Yahudi Kanada dalam artikel yang diterbitkan berjudul “CJPAC mengklaim sukses setelah pemilu federal”. Keberhasilan lobi Yahudi tersebut kemudian telah menarik pemerintahan Kanada di bawah Stephen Harper dalam perhatiannya terhadap urusan-urusan Yahudi. Dalam advokasi-advokasi yang dilakukan CJPAC dengan pemerintah Kanada, CJPAC menyarankan tindakan tegas pemerintah Kanada terhadap isu nuklir Iran. CJPAC menganggap bahwa Iran dan nuklirnya menimbulkan ancaman untuk bangsa Yahudi dan mendesak pemerintah Kanada untuk memerangi Iran dan program nuklirnya.

Lobi Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA)

Organisasi Yahudi Kanada yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi perpolitikan Kanada yaitu CIJA. CIJA merupakan sebuah organisasi nasional yang didedikasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang Yahudi di Kanada melalui koordinasi strategis, pemrograman advokasi bertarget untuk memajukan kebijakan kepentingan publik dari komunitas-komunitas Yahudi Kanada yang terorganisir. Selama bertahun-tahun, CIJA berada di garis depan dalam upayanya agar sanksi Kanada terhadap Iran ditingkatkan. Pada bulan april 2008, CIJA menerima akreditasi sebagai organisasi non-pemerintah untuk dapat menghadiri konferensi PBB mengenai isu-isu kemanusiaan terutama di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran sendiri sempat menolak dan keberatan terhadap akreditasi yang diterima CIJA tersebut.

Peran CIJA dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Kanada terlihat lebih nyata ketika CIJA mampu mengambil alih Kongres Yahudi Kanada pada tahun 2011 dan menjadi kelompok lobi dominan masyarakat Yahudi di Kanada. CIJA mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah Iran dan mendesak pemerintah Kanada mengambil langkah tegas, hal tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan CEO CIJA, yaitu Shimon Fogel, yang menyatakan tentang bahaya dari nuklir Iran seperti berikut:

“...kita pernah menyaksikan kengerian Perang Dunia II. Para pemimpin Iran tidak akan menjadi yang pertama untuk mengambil tindakan merusak diri sendiri yang tampaknya tak terbayangkan kepada kami, dan tidak ada yang dapat memberitahu Israel bahwa sejarah tidak akan mengulangi itu sendiri. Memang, Israel - atau orang lain - tidak boleh dipaksa untuk hidup di bawah bayang-bayang pemusnahan nuklir.”

Lobi CIJA dan upaya-upaya penjangkauan yang telah dilakukan di antaranya termasuk pertemuan-pertemuan dan fungsi yang menarik para pejabat pemerintah Kanada, termasuk Perdana Menteri Stephen Harper. Hal tersebut terlihat nyata yang salah satunya adalah dengan membiayai perjalanan para pejabat Kanada ke Israel dengan biaya perjalanan sebesar \$239ribu. Pendanaan biaya perjalanan dari organisasi CIJA tersebut merupakan salah satu upaya lobi Yahudi kepada pemerintah Kanada untuk lebih mengikat mereka agar pro terhadap bangsa Yahudi dan Israel seperti yang dikatakan Shimon Fogel selaku CEO CIJA seperti berikut:

“Tentu saja untuk komunitas Yahudi hal tersebut memberikan banyak nilai twin-validasi di tempat kami di Kanada serta hubungan dan komitmen kepada negara Yahudi”

Lobi Media Yahudi

Lobi Media Yahudi di Kanada juga tidak kalah penting dalam peranannya mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Kanada. Beberapa media Yahudi yang terbentuk di Kanada antara lain adalah *The Jewish Tribune*, *The Jewish Post and News*, dan *Canadian Jewish News*. Media Yahudi mampu mendominasi

Kanada dengan porsi sebesar 95% dari total keseluruhan media yang ada di Kanada. Dengan adanya media Yahudi di Kanada, hal tersebut semakin memperluas lobi Yahudi atas peran kontrol terhadap kebijakan-kebijakan politik luar negeri Kanada. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana Kanada tidak mengecam ataupun mengutuk tindakan-tindakan keji bangsa Yahudi Israel ketika menyerang negara-negara Arab. Pemerintah Kanada terlihat mendukung setiap tindakan bangsa Yahudi Israel dan bahkan serangan balasan yang dilakukan oleh negara ataupun kelompok Islam dianggap sebagai terorisme.

Peran media yang persuasif semakin menanamkan ideologi zionisme dan berbalik mengecam negara dan kelompok Islam ekstrimis sebagai teroris dan pada akhirnya semakin mengkampanyekan kebijakan-kebijakan pro Israel sebagai sebuah kebenaran dan keharusan. Berita-berita yang disebar media Yahudi di Kanada pada akhirnya membentuk opini publik yang menyudutkan negara-negara Islam, termasuk Iran, dimana media-media Yahudi Kanada menyebarkan doktrin bahwa Iran adalah negara teroris apalagi dengan program nuklirnya yang dianggap sebagai ancaman keamanan dunia, terutama bagi bangsa Yahudi Israel.

KESIMPULAN

Kebijakan politik luar negeri sebuah negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan arah kebijakan luar negeri terjadi akibat kondisi perpolitikan internasional yang berubah. Meskipun Kanada telah menjalin hubungan diplomatik dengan Iran sejak lama, akan tetapi perubahan kondisi politik dalam negeri Iran dan kondisi politik internasional telah menciptakan fluktuasi hubungan di antara kedua negara tersebut. Permasalahan-permasalahan yang timbul di antara kedua negara tersebut telah membawa ketegangan hubungan yang berkepanjangan dan berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.

Sejak rezim Ayatullah Khomeini berkuasa, pemerintah Iran menghendaki penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan bahkan hingga penerapannya dalam hukum negara. Selain itu, pemerintah Iran juga bersikeras melanjutkan pengembangan program nuklirnya meskipun telah mendapatkan banyak tekanan dari Dewan Keamanan PBB dan negara-negara lain di dunia. Konflik-konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran dengan negara-negara lainnya, khususnya Israel sebagai negara bangsa Yahudi, juga sangat bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Kanada yang pro terhadap Israel. Di samping itu, dalam kebijakan politik luar negeri Kanada juga memberikan perhatiannya pada isu krisis kemanusiaan, keamanan dan perdamaian dunia.

Pemerintah Kanada melihat pemerintah Iran sebagai pemerintahan yang ekstrimis. Pemerintah Kanada mengeluarkan kebijakan politik luar negeri terkait pemutusan hubungan diplomatik terhadap Iran dipengaruhi oleh beberapa alasan dan dengan melalui proses politik yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kebijakan politik luar negeri pemerintah Kanada

terhadap Iran juga tidak dapat dipisahkan dari tekanan-tekanan kelompok lobi Yahudi yang mendukung kebijakan politik luar negeri Kanada yang pro Israel.

Kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kanada terhadap Iran dibawah kepemimpinan Stephen Harper mulai dari mensponsori resolusi PBB terkait pelanggaran HAM dan pengembangan program nuklir Iran hingga pemberian sanksi ekonomi beberapa kali terhadap Iran sama sekali tidak memberikan hasil yang positif. Di sisi lain tekanan yang kuat atas kewajiban pemerintah Kanada dalam menjaga komitmen untuk selalu mendukung bangsa Yahudi dan negara Israel dalam melindungi hak untuk hidup damai dengan negara-negara tetangga membuat pemerintah Kanada harus bersikap tegas terhadap Iran yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan bangsa Yahudi di Israel.

Hubungan antara pemerintah Kanada dengan Iran yang telah berlangsung sejak tahun 1955 pada akhirnya harus berujung dengan pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Kanada terhadap Iran pada tahun 2012. Dalam hal ini pemerintah Kanada mendapatkan tekanan-tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan Yahudi di Kanada atas dasar keamanan bagi bangsa Yahudi di Israel untuk bertindak tegas terhadap Iran yang berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Kebijakan politik luar negeri Kanada terhadap Iran tersebut diambil oleh pemerintah Kanada melalui proses interaksi politik yang terjadi di antara pemerintah Kanada dengan kelompok-kelompok kepentingan Yahudi Kanada.

DAFTAR PUSTAKA

Bookmiller, Robert J. Engaging Iran: Australia and Canadian Relations with the Islamic Republic, (Dubai: Gulf Research Center, 2009).

Department of Foreign Affairs and International Trade, Special Economic Measures (Iran) Regulations, (Ottawa: Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada, 2010).

Federal Research Division, Country Profile: Iran, (Library of Congress, 2008).

Organisation for Economic Co-operation and Development, Economic Surveys CANADA, (OECD, 2014).

United Nations, CANADA Public Administration Country Profile, (United Nations, 2006).

Government of Canada. "Trade and Development Canada". 22 Oktober 2015. <http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/iran.aspx?lang=eng>.